

PERADABAN INFRASTRUKTUR IBNU KHALDUN (Perspektif Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia)

Syamsuri Akil

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Email: syamsuri.akil@gmail.com

Abstract:

Prophet Muhammad p.b.u.h., moved (hijrah) from Mecca al-Mukarramah to Medina al-Munawwarah, then founded the state of Medina by gathering the national strength of the Muslim, Christian and Jewish population with the identity of the Quraish, Auz, and Khazraj tribes. Caliph Ali bin Abi Talib moved the capital of the Rashidah Caliphate from Medina to Kufa, from Arab to the Persian region. Muawiyah bin Abu Sufyan chose Damascus as the capital of the Umayyah dynasty. Abu Abbas al-Safah placed the seat of the Abbasid dynasty in Baghdad. Furthermore, the Ottoman Empire had its capital in Istanbul. After turning into the Republic of Turkey, it occupies Ankara as the capital. Planning of moving the capital city of the Republic of Indonesia is from the Province of the Special Capital Region (DKI) Jakarta to the Province of East Kalimantan intended as an effort to equalize development that strengthen togetherness in a sense. The ideological, political, social, cultural and legal foundations serve as the basis of legitimacy in the historical footsteps of the Paser Kingdom and the Kutai Kartanegara Kingdom, as the center of government of the Republic of Indonesia. The theory of development ('umran), urban theory ('urban), and the theory of nationality ('asabiyah) put forward by Ibn Khaldun in the Muqaddimah have become methodological conceptions in studying maritime-based archipelago construction. This research shows the point of the new State Capital (IKN), in the archipelago network from Sabang to Merauke. A blueprint for the nation's journey that covers the dynamics of human resource potential in the natural resource management system of the republic of Indonesia.

Nabi Muhammad saw. berpindah (hijrah) dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah, lalu mendirikan negara Madinah dengan menghimpun kekuatan kebangsaan dari penduduk Muslim, Nasrani, dan Yahudi dengan identitas suku Quraisy, suku Auz, dan suku Khazraj. Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibukota Khilafah Rasyidah dari Madinah ke Kufah. Dari kawasan Arab ke kawasan Persia. Muawiyah bin Abu Sufyan memilih Damaskus sebagai ibukota Dinasti Umayyah. Abu Abbas al-Safah menempatkan pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah di Bagdad. Selanjutnya, Dinasti Turki Usmani beribukota di Istanbul. Setelah beralih menjadi Republik Turki, menempati Ankara sebagai ibukota. Rencana perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dimaksudkan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang akan menguatkan kebersamaan dalam bernegara. Landasan ideologi, politik, sosial, budaya, dan hukum menjadi pijakan legitimasi dalam jejak historis wilayah Kerajaan Paser dan Kerajaan Kutai Kartanegara, sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Teori pembangunan ('umran), teori perkotaan ('urban), dan teori kebangsaan ('ashabiyah) yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, menjadi konsepsi metodologis dalam mengkaji konstruksi nusantara berbasis maritim. Penelitian ini menampilkan titik wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru, dalam jaringan nusantara dari Sabang sampai Merauke. Sebuah cetak biru perjalanan bangsa yang menaungi dinamika potensi sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan sumber daya alam Republik Indonesia.

Kata Kunci : *Sejarah, Bahari, Negara*

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengumumkan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia. Letaknya yang strategis pada tataran geografis, juga memiliki rekaman budaya yang masyhur dalam pergulatan episentrum pelayaran nusantara di masa lampau. Kerajaan Paser dan Kerajaan Kutai Kartanegara telah banyak menorehkan popularitas peradaban dalam konteks kemajemukan kebangsaan. Hubungan dengan para raja di pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, masih tercatat dalam berbagai manuskrip klasik tulisan aksara-aksara daerah.

Indonesia adalah negara maritim (*archipelagic state*) yang bertabur ribuan pulau. Jaringan maritim terbentuk dari pelabuhan ke pelabuhan oleh peran para pelaut. Denys Lombard mengemukakan bahwa hubungan ekonomi dan kebudayaan lebih sering terjalin di antar pantai yang satu dengan pantai yang lain, daripada di antara suatu daerah dengan daerah lain di pulau yang sama.¹ Anugerah laut Indonesia adalah lintasan transportasi antar pulau, yang kini diupayakan memiliki koneksi dengan kendaraan umum seperti bus dan kereta api. Sehingga relasi antar pulau dan antara daerah di satu pulau dapat terjaring dengan aman dan cepat.

Para peneliti sejarah bahari, seperti Chadhuri, Reid, Lopian, dan lain-lain, menunjuk pada kenyataan bahwa tradisi bahari nusantara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi bahari Asia. Sampai batas ingatan sejarah ke masa-masa yang sangat remang-remang, Samudera Hindia merupakan pemersatu

¹Abd. Rahman Hamid, “Kalimantan Dalam Jaringan Maritim Mandar”, Diskusi Virtual yang diselenggarakan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kalimantan Timur, 15 Juli 2020.

yang melahirkan satu tradisi "peradaban dan perniagaan" di Asia. Sejak itu, Teluk Parsi, Laut Merah, Laut Arab, Teluk Benggala, Selat Malaka, Laut Jawa, dan lain-lain merupakan tangan-tangan gurita yang terkait pada induknya, yaitu Samudera Hindia. Lalu lintas perdagangan maupun interaksi budaya terjadi dalam jangkauan bahari Samudera Hindia tersebut sejak berabad-abad yang lalu. Melalui jalur inilah kita bersentuhan dengan sistem budaya Hindu-Budha, Islam, Kristen, maupun Barat.²

Landasan teologis dan ideologis dalam konsepsi pengaturan bernegara Republik Indonesia, dapat dikaji dengan pandangan teknologis seperti karya Ibnu Khaldun pada kitab *Muqaddimah*. Besarnya suatu negara, luas daerahnya, dan panjang usianya, tergantung kepada besar kekuatan pendukungnya. Sebabnya, ialah karena suatu kedaulatan tidak dapat didirikan tanpa ikatan kebangsaan. Orang-orang yang memiliki ikatan kebangsaan akan menjadi pelindung suatu negara. Negara yang memiliki lebih banyak suku yang bersatu dan saling menguatkan, maka negara itu lebih kuat dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas.³

Inovasi pembangunan infrastruktur di wilayah pengembangan ibu kota negara, menandai akumulasi perjalanan sejarah dengan tampilan peradaban yang masyhur. Indonesia, selama dua ribu tahun sejarahnya, telah menjadi sebuah persilangan budaya. Peradaban-peradaban yang terpenting di dunia (India, Islam, Cina, dan Eropa) bertemu di situ, diterima, diolah, dikembangkan, dan diperbarui.⁴ Kerajaan Paser dan Kerajaan Kutai

²R.Z. Leirissa, "Masyarakat Bahari Dalam Perspektif Sejarah", dalam Muhadam Labolo (editor), *Kepemimpinan Bahari Sebuah Alternatif Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 31 – 32.

³ Abd al-Rahman bin Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut : al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2008), h. 151.

⁴ Denys Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya*, Jilid 2, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 511.

Kartanegara, termasuk dalam rangkaian persilangan budaya, yang masih tercatat dalam manuskrip nusantara, berupa rute-rute kapal laut dan penetapan tarif perjalanan dari pelabuhan ke pelabuhan.

Seperti halnya Batavia⁵ yang menjadi incaran empuk Pemerintah Hindia Belanda, tempat kedudukan beberapa Gubernur Jenderal. Wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara juga menjadi incaran penjajah. Pada tahun 1888, Raja Kutai Kartanegara Sultan Aji Muhammad Sulaiman menerbitkan konsesi yang bersifat saling menguntungkan kepada Hindia Belanda. Dari konsesi itu, Hindia Belanda berhak meneliti, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi minyak bumi dan batu bara. Di bawah kongsi dua perusahaan Belanda dan Inggris, *Bataafsche Petroleum Maatschappij* dan *Shell*, penelitian dimulai di Balikpapan. Enam tahun setelah penerbitan konsesi atau pada 1894, ditemukan sumur minyak dengan nilai komersial. Sumur berkedalaman 220 meter itu dibor di Gunung Komendur pada 10 Februari 1897.

Ibnu Khaldun mensinyalir pentingnya kedudukan pusat pemerintahan suatu negeri, yaitu :

“Syahdan di pusat negara lebih kuat di banding di daerah, dan perbatasan lebih lemah dibanding pusat, sedang di lua

⁵Pada tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah merebut Kerajaan Sunda Kelapa dari dominasi Portugis, kemudian berganti nama menjadi Jayakarta atau Jakarta. Pada tahun 1596, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba pertama kali di Pelabuhan Sunda Kelapa dengan tujuan utama mencari rempah-rempah, mengingat pada saat itu rempah – rempah merupakan komoditas utama di Belanda karena berbagai khasiatnya seperti obat, penghangat badan, dan bahan wangi-wangian. Pada tahun 1610 Belanda membuat perjanjian dengan Pangeran Jayawikarta atau Wijayakarta penguasa Jayakarta dan membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Belanda diijinkan membuat gudang dan pos dagang di timur muara sungai Ciliwung. Setelah perjanjian disetujui Belanda mendapat keuntungan yang besar akibat perdagangan rempah-rempah yang mereka lakukan di negeri asal mereka. Melihat keuntungan yang pesat, Belanda akhirnya memutuskan untuk melakukan ekspansi di Jayakarta dan kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia.

perbatasan keadaannya paling lemah. Begitulah bagaikan cahaya bersinar melingkar dari pusat, atau bagaikan lingkaran riak di permukaan air tempat air itu dipukul. Dan apabila usia tua dan kelemahan telah menimpakan suatu negara, maka kemunduran akan bermula di daerah-daerah pinggir. Pusat masih bertahan, hingga Allah memastikan runtuhnya negara itu sama sekali. Dan manakala suatu negara telah dikalahkan di pusatnya, tidak akan berguna kepadanya daerah-daerahnya yang masih tetap berdiri; karena negara yang dalam keadaan demikian itu pasti akan lenyap. Sebab pusat adalah laksana jantung, tempat asal nyawa ditebarkan, dan apabila jantung telah dikuasai, maka anggota badan yang jauh dari jantung akan segera dikuasai pula.⁶”

Begitu pentingnya kedudukan ibu kota negara, maka dimensi-dimensi kekokohan paradigmatis sangat perlu dikaji dan didalami. Paradigma Ibnu Khaldun dalam konsepsi peradaban infrastruktur, memuat cakrawala ideologis dan teologis, karena studi dinasti-dinasti Islam di Afrika Utara, Andalusia, Persia, dan Ottoman telah dipaparkan mengenai timbul dan tenggelamnya sebuah kekuasaan. Potret kekuasaan di nusantara dengan kekuatan kerajaan-kerajaan dalam menghadapi invasi kolonialisme, tampak berhasil memasuki gerbang kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

METODE DAN PENDEKATAN

Metode penelitian tentang kekuatan teologis dan ideologis Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia, dapat dilihat pada teori Ibnu Khaldun yaitu teori pembangunan (*‘umran*), teori perkotaan (*‘urban*), dan teori kebangsaan (*‘ashabiyah*). Negara yang berdasar

⁶ Abd al-Rahman bin Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terjemahan Ahmadie Thoha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h. 198.

Pancasila ini adalah peralihan bentuk-bentuk pemerintahan dari kekuatan komunitas lokal, kemudian disatukan dalam bentuk kekuasaan terpusat (inilah yang disebut kerajaan), kemudian menjadi kesultanan, lalu menjadi Republik Indonesia.

Sedangkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teknoteologis. Pembangunan infrastruktur mengacu pada kebutuhan masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan kekuatan alam. Kesetiaan dalam menjalankan ajaran agama, pada penduduk Indonesia menjadi acuan fundamental dalam menyusun kerangka pengembangan ibu kota negara.

RIWAYAT HIDUP IBNU KHALDUN

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun. Lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Maschi. Asal usul keluarga Ibnu Khaldun dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan, Khalid bin Usman. Kakek Ibnu Khaldun pindah dari Yaman ke Andalusia, sebagai anggota pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan “un” sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandanginya. Dengan demikian Khalid menjadi Khaldun.

Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya. Dia belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Dia fasih dalam *qiraah sab'ah* (tujuh cara membaca Al-Qur'an). Dia memperlihatkan perhatian yang seimbang dan merata antara mata pelajaran Tafsir, Hadis, Fiqh, dan Gramatika bahasa Arab yang diperoleh dari beberapa guru di Tunisia. Waktu itu, Tunisia merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan sastra Arab. Kemudian secara khusus

mendalami Ilmu Hadis dan Fiqh Mazhab Maliki, di samping ilmu bahasa, sastra, mantik, dan filsafat.⁷

Pada usia delapan belas tahun, terjadilah dua peristiwa penting yang kemudian memaksa Ibnu Khaldun berhenti menuntut ilmu. *Pertama*, berkecamuknya wabah kolera dengan sebutan *the Black Death* di banyak bagian dunia pada tahun 749 H (1348 M), telah banyak menelan korban jiwa, di antaranya ayah dan ibu Ibnu Khaldun dan sebagian besar guru-guru yang pernah dan sedang mengajarnya. *Kedua*, setelah terjadinya malapetaka tersebut, banyak ilmuwan dan budayawan yang selamat dari wabah itu pada tahun 1350 M, berbondong-bondong meninggalkan Tunisia pindah ke Afrika Barat Laut. Dengan terjadinya dua peristiwa itu, berubahlah jalan hidup Ibnu Khaldun. Dia terpaksa berhenti belajar dan mengalihkan perhatiannya pada upaya mendapatkan tempat dalam pemerintahan.⁸

Karir pekerjaan Ibnu Khaldun dimulai dengan mengabdikan diri di pemerintahan Abu Muhammad bin Tafrakin pada tahun 751 H/1349 M. Ibnu Khaldun bekerja sebagai penulis kata al-hamdulillah dan al-syukrulillah dengan pena, serta tulisan basmalah yang mengawali surat atau instruksi. Pekerjaan ini membutuhkan suatu keahlian merumuskan konsep, sehingga rangkaian kata-kata syukur dan nisan surat dapat berpadu menjadi satu kesatuan tulisan yang serasi.⁹

Ibnu Khaldun meniti karir dalam bidang pemerintahan dan politik, di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Dalam kurun waktu itu lebih sepuluh kali berpindah jabatan. Jabatan pertama yang diemban adalah masuk

⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 1993), h. 90.

⁸*Ibid.* h. 91

⁹Ali Abdul Wahid Wafi, *Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 4.

menjadi keanggotaan majelis ilmuwan Sultan Abu Inan pada Dinasti Bani Marin yang berkedudukan di Fez. Kemudian diangkat menjadi sekretaris Sultan dengan tugas mencatat semua keputusan Sultan terhadap permohonan-permohonan dari rakyat, dan dokumen-dokumen lain yang diajukan ke Sultan.¹⁰

Pada zaman Sultan Abu Salim, Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris negara, kemudian mutasi sebagai pejabat tinggi kepercayaan sultan untuk mengelola peradilan *Mazhalim*, yang khusus menangani pengaduan terhadap negara atau pejabat negara dan tindak pidana yang tidak tercakup oleh hukum Islam. Ketika Sultan Abu Salim berhenti jadi raja, berakhir pula karir Ibnu Khaldun di pemerintahan Bani Marin. Setelah itu, berangkatlah ke Andalusia. Selama di Andalusia, Ibnu Khaldun pernah mendapat kepercayaan sebagai utusan khusus atau duta besar untuk menyelesaikan masalah dengan negara tetangga. Lebih satu tahun diemban jabatan ini, tiba-tiba mendapatkan jabatan perdana menteri di Tunisia, dibawah pemerintahan Abu Abdullah.¹¹

Di Tunisia, terjadi suksesi kepemimpinan dari Abu Abdullah ke Sultan Abu Abbas. Sultan ini meminta Ibnu Khaldun untuk menyertainya dalam suatu ekspedisi militer. Setelah selesai ekspedisi, Ibnu Khaldun berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Dia meninggalkan Tunisia, berlayar menuju Aleksandria Mesir, pada tahun 1382 M. Dengan keberangkatannya dari Tunisia, berakhirilah karir politik dan birokrasi Ibnu Khaldun di Afrika Barat Laut.

Setelah lebih kurang empat hari berlayar sampailah di Aleksandria. Ibnu Khaldun tidak langsung pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang dia rencanakan semula, tetapi baru beberapa tahun kemudian, baru melaksanakan

¹⁰Munawir Sjadzali, *Islam ...* h. 92

¹¹*Ibid.*, h. 93.

maksudnya itu. Setelah sekitar satu bulan berada di kota pantai itu, pergilah dia ke Kairo, ibu kota Kerajaan Mamalik dan pusat ilmu pengetahuan serta kebudayaan Islam. Sejak kedatangannya di Aleksandria, selama hampir dua puluh empat tahun sampai wafatnya, Ibnu Khaldun tetap tinggal di Mesir. Hanya beberapa kali dia meninggalkan negeri itu untuk mengadakan kunjungan pendek ke luar, di antaranya ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, ke Suriah dan ke Masjid al-Aqsa, kemudian kembali ke Kairo.¹²

Berselang berapa hari sebelum kedatangan Ibnu Khaldun, di Mesir berlangsung pengangkatan sultan yaitu Malik al-Zahir Burquq. Ibnu Khaldun segera dekat dengan penguasa yang baru. Mula-mula ia diberi kesempatan untuk memberi kuliah di Universitas al-Azhar. Ketika ada lowongan, ia diangkat oleh Sultan Burquq menjadi guru besar luar biasa pada tanggal 19 Maret 1834.¹³ Di universitas tersebut, Ibnu Khaldun mengajar hadis dan hukum Islam menurut Mazhab Maliki. Ia menguraikan teorinya tentang masyarakat, '*ashabiyah*, dasar-dasar kekuasaan negara, bangkit dan runtuhnya suatu negara, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelajaran-pelajaran itu membuktikan luasnya pendidikan dan kemahirannya dalam mengajar.¹⁴

Di Kairo, Ibnu Khaldun diangkat sebagai dosen fiqh mazhab Maliki pada Lembaga Pendidikan Qamhiyah. Para pejabat tinggi dan ulama diutus oleh Sultan Malik al-Zahir Burquq untuk menghadiri kuliah perdana Ibnu Khaldun di lembaga itu. Para peserta sangat kagum dengan penguasaan pada bidang keilmuan yang dipercayakan kepadanya. Beberapa bulan kemudian, ketika

¹² *Ibid.*, h. 97.

¹³ Biyanto, *Teori Siklus Peradaban : Perspektif Ibnu Khaldun*, (Surabaya: Lpam, 2004), h. 38.

¹⁴ A. Mukti Ali, *Ibnu Chaldun dan Asal Usul Sosiologi*, (Yogyakarta : Yayasan Nida, 1997), h. 13.

hakim agung Mazhab Maliki, Syekh Jamaluddin Abd al-Rahman bin Sulaiman bin Khair Maliki, diberhentikan oleh Sultan, Ibnu Khaldun diangkat menggantikannya.¹⁵

Ibnu Khaldun menerima kepercayaan sebagai hakim agung untuk Mazhab Maliki, dengan penuh semangat, namun tanpa mengingat bahwa dia belum lama tinggal di Mesir. Dia langsung melaksanakan reformasi dalam aparat dan pelaksanaan peradilan Mazhab Maliki. Ini kemudian menimbulkan kemarahan orang-orang yang dirugikan, dan mereka berhasil memfitnah Ibnu Khaldun sampai dipecat dari jabatan hakim agung, yang hanya satu tahun diembannya. Setelah dipecat diangkat lagi untuk menduduki jabatan hakim agung, sehingga terdapat akumulasi sebanyak lima kali memangku jabatan hakim agung.

Pada akhirnya, Allah swt. berkehendak terbaik pada hambaNya yang terbaik pula. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi dan dimakamkan di kompleks makam tokoh-tokoh dan ulama terkemuka di luar pintu gerbang kota Nashr, Kairo Mesir. Kepergiannya menghadap kehadiran Ilahi Rabbi, tentu meninggalkan makna yang mendalam bagi lika liku politik, yang ternyata di dalamnya banyak kepentingan.

PARADIGMA INFRASTRUKTUR IBNU KHALDUN

Deretan bangunan berdiri tegak dan megah diapit hamparan jalan raya, terhubung stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara, terciptalah akses penduduk untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pembangunan suatu gedung; baik untuk tempat tinggal, arena perdagangan, pabrik, dan perkantoran merupakan dialog non verbal dari suatu sistem alam dan kondisi penduduk yang mendiami suatu wilayah.

¹⁵ *Ibid.*

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa anda harus mengetahui batu-batu tak terurai paling cocok yang dapat dioperasikan. Anda harus mengetahui genusnya, kekuatan, perbuatan dan sesuatu apa yang berupa pemuatan dan pengerasan, pemurnian, klasifikasi, absorpsi, atau transformasi, yang dapat memberikan efek. Orang yang tidak mengetahui prinsip-prinsip dasar kimia tak akan pernah mencapai hasil yang baik. Anda harus mengetahui apakah (batu-batu itu) dapat ditambahkan dengan sesuatu yang lain, atautah cukup dengan apa adanya sendiri, apakah ia merupakan satu hal sendiri sejak awal, atautah ia ditemani lainnya, dan menjadi satu hal dengan sendirinya selama perlakuan (*tadbir*), dan karenanya disebut ‘batu’. Anda harus juga mengetahui bagaimana cara kerjanya; berapa ukuran dan waktu memadai untuknya, bagaimana ruh menyelip ke dalamnya, dan bagaimana pula jiwa masuk ke dalamnya. Apakah api dapat memisahkan jiwa dari batu setelah ia berada di dalamnya; bila tidak, mengapa tidak, dan apa yang mengharuskannya demikian. Inilah yang harus diketahui.¹⁶

Batu bahan baku perkembangan peradaban manusia. Pengelolaan batu menjadi semen, marmer, batubara, intan, dan permata. Kajian tentang lapisan-lapisan tanah memuat segmen bebatuan, menjadi analisis utama dalam kekuatan pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Basuki Hadimuljono mengemukakan pentingnya analisis bebatuan dalam lapisan tanah, untuk pembangunan infrastruktur. Kasus pembangunan gedung Wisma Atlet Hambalang berada di Formasi Jatiluhur yang berupa *clay shale* (batu lempung yang terdiri atas lapisan-lapisan tipis). Sifat mekanis *clay shale* ini ketika kering akan menyusut dan mengeras, tapi ketika basah akan mengembang, sehingga *clay*

¹⁶Ibn Khaldun, *Muqaddimah* ... terjemahan ... h. 699

shale ini digolongkan tanah ekspansif. Pada kondisi basah, batuan ini kehilangan gaya geser sehingga penurunan tanah bisa terjadi tiba-tiba. Dengan kondisi geologi seperti itu, pondasi bangunan tidak bisa berada pada *clay stone*. Karena itu ketika bangunan proyek Hambalang ini didirikan di lapisan batuan tersebut, keruntuhan bangunan sudah terjadi. Harusnya pondasi sampai pada batuan *basement*.¹⁷

Sekaitan dengan peradaban infrastruktur, Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an pada Surah An-Nahl ayat 15 :

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya :

“Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.”

Kata '*rawasiya*' untuk menyebut 'gunung', dan '*laqaya*' untuk makna 'menancapkan'. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa Allah swt. menjadikan gunung-gunung yang mengokohkan bumi agar ia tidak goncang dan miring. Allah swt. yang mengalirkan sungai-sungai agar manusia bisa minum dan memberi minum hewan-hewan serta menyiram tanaman-tanaman. Allah swt. memberi ilmu kepada manusia untuk membelah bumi menjadi jalan raya, yang dapat dilalui sehingga bisa sampai ke tujuan tanpa tersesat.

Konstruksi ilmu pengetahuan Ibnu Khaldun dalam paradigma peradaban infrastruktur, ditopang oleh tiga teori, yaitu :

1. Teori Perkotaan ('Urban)

Ibnu Khaldun mengemukakan teori urban dengan terlebih dahulu menampilkan suku Badui kemudian orang-orang kota yang

¹⁷ Tim Ekspedisi Palu Koro, "Geologi di Tengah Gencarnya Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Jokowi", dalam <http://ekspedisipalukoro.id/2017/05/10/geologi-di-tengah/>

sama-sama merupakan golongan alami. Perbedaan hal ihwal penduduk adalah akibat dari perbedaan cara memperoleh penghidupan. Orang-orang yang hidup bermasyarakat tidak lain hanyalah untuk saling membantu di dalam memperoleh penghidupan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, sebelum mencari kebutuhan hidup yang lebih tinggi. Ada yang hidup dengan bertani, menanam sayur dan buah-buahan; dan ada pula yang hidup dengan memelihara binatang, baik itu kambing, sapi, domba, lebah, dan ulat sutra, untuk dikembangbiakkan atau diambil hasilnya. Orang-orang yang hidup dengan bertani dan memelihara binatang, harus menerima panggilan padang pasir, sebab dia sendiri butuh kepada tanah yang luas, padang rumput untuk gembala binatang, alat membajak, dan lain-lain. Kehidupan bermasyarakat dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan peradaban, seperti makanan, perlindungan, dan panas tidak melecut untuk memperolehnya, lebih dari batas kebutuhan guna melangsungkan kehidupan menurut batas kebutuhan hidup.¹⁸

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia masih berkisar pada sandang, pangan, dan papan. Pergulatan persaingan hidup belum tampak di daerah-daerah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Masing-masing petani memiliki hubungan sama rata sama rasa dengan petani lainnya. Kepentingan penguasaan lahan untuk gembala dan pertanian dan perkebunan, diarahkan untuk menguatkan kehidupan satu sama lain. Kehidupan antar keluarga terjadi dengan harmonis, karena ada ikatan kepentingan bersama, yaitu persediaan makanan dan minuman. Kebutuhan sandang berupa pakaian, diselenggarakan dengan cara sederhana yaitu untuk melindungi diri, yaitu fisik dan kehormatan. Sedangkan kebutuhan

¹⁸ Abd al-Rahman bin Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terjemahan Ahmadie Thoha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h. 141.

papan berupa tempat tinggal, berlangsung secara gotong royong dengan memanfaatkan sumber daya alam tersedia.

Apabila kondisi semakin nyaman, yakni orang-orang sudah memperoleh kekayaan dan kemewahan di atas batas yang dibutuhkan, lalu muncul perasaan tenang dan merasa tidak ambil pusing. Orang-orang akan saling membantu berusaha memperoleh sesuatu di atas batas kebutuhan. Orang-orang mempergunakan banyak makanan, pakaian dan berbangga diri. Selanjutnya, para penduduk membangun rumah-rumah besar, dan mempercantik kota untuk tempat berlindung.¹⁹

Masyarakat kota adalah kumpulan para pendatang dari desa, karena adanya pergerakan dinamika kehidupan sosial. Masyarakat kota menjadi komunitas elit, yang saling bahu membahu dalam membangun konteks peradaban. Tampaknya, peradaban tercipta karena kota menjadi titik mengalirnya kekayaan dari desa-desa. Konsensus tatanan sosial disusul peciptaan kekuasaan politik yang mampu mengontrol saluran ekonomi yang diperkuat dengan pembayaran pajak.

Kota merupakan tempat tinggal yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa, begitu puncak kemewahan yang diinginkan beserta segala seginya telah tercapai. Lalu penduduk kota berusaha semaksimal mungkin hidup tenteram dan aman sentosa, serta beralih menggunakan rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan mendirikan kota adalah supaya memiliki tempat tinggal dan tempat berlindung. Karenanya, dalam hubungan ini mereka menganggap penting memperhatikan upaya melenyapkan segala bahaya dari kota dengan cara menjaganya dari serangan, serta memasukkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kota, dan

¹⁹ *Ibid*, h. 142

menggunakan alat-alat pembantu mempermudah kehidupan di kota.²⁰

Pandangan Ibnu Khaldun tersebut, memang sudah menjadi kenyataan pada pembangunan di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan perkotaan menjadi prioritas bagi penguasa, karena menjadi etalase keberhasilan selama memimpin. Kantor-kantor pemerintahan berada di kota, dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis, supaya warga kota merasa nyaman dari ancaman bahaya.

Untuk menghindari bahaya, semua rumah yang ada di kota diberi pagar tembok. Selanjutnya, kota diletakkan dalam situasi demikian rupa, hingga untuk sampai ke kawasan itu, harus melewati jembatan. Dengan demikian, masuk sukar masuk ke dalam kota, dan penjagaan serta pembentengannya meningkat beberapa kali lipat. Untuk menjaga dari bahaya yang berhubungan dengan gejala atmosfer, hendaklah diperhatikan adanya udara yang sehat. Bila udara mati dan buruk, atau berdekatan dengan air yang busuk, atau dengan kolam dan tempat mandi yang tengik, dengan cepat udara tercemar. Dampaknya, semua makhluk hidup dengan cepatnya dihindangi penyakit. Fakta ini sudah terbukti oleh pengamatan langsung.²¹

Gairah dan ghirah penduduk desa untuk menempuh pendidikan di jenjang menengah dan tinggi, mendorong informasi kenyamanan tinggal di kota menyeruak ke pelosok-pelosok desa. Hal inilah yang menyebabkan gelombang urbanisasi terus meningkat. Daya tampung perkotaan semakin sesak sehingga terus terjadi pelebaran wilayah. Fenomena ketimpangan sosial ekonomi perkotaan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan ekologi.

²⁰ *Ibid*, h. 401.

²¹ *Ibid*, h. 402.

Perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, mewarnai dinamika kehidupan sosial. Perbedaan potensi sebuah wilayah menyebabkan perpindahan manusia, untuk memenuhi kemampuan adaptasi dengan wilayah yang cocok dengan keahlian yang dimilikinya. Pergumulan dari berbagai arah menuju pada suatu titik, inilah kemudian yang melahirkan sebuah kawasan wilayah perkotaan. Titik-titik asal muasal manusia kemudian disebut wilayah pedesaan. Sehingga urban selalu diartikan masyarakat kota.

Permukiman manusia pada masa lalu pada dasarnya bersifat rural. Kemudian timbullah surplus produksi, sehingga masyarakat rural berkembang menjadi masyarakat urban. Kompleksitas bangunan dan tipologinya pun meningkat. Teknologi pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan mulai berkembang. Tipologi bangunan baru seperti sekolah, rumah sakit, dan sarana rekreasi pun bermunculan.

Mobilitas kehidupan manusia dalam konteks masyarakat, selanjutnya dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, sebagai berikut :

“Sesungguhnya organisasi kemasyarakatan umat manusia adalah satu keharusan. Para filosof telah melahirkan kenyataan ini dengan perkataan mereka : manusia adalah bersifat politis menurut tabiatnya. Ini berarti, ia memerlukan suatu organisasi kemasyarakatan, yang menurut para filosof dinamakan “kota”.

Dan itulah yang dimaksud dengan peradaban. Keharusan adanya organisasi kemasyarakatan manusia atau peradaban itu dapat diterangkan oleh kenyataan, bahwa Allah swt. telah menciptakan dan menyusun manusia itu menurut satu bentuk yang hanya dapat tumbuh dan mempertahankan hidupnya dengan bantuan makanan. Ia memberi petunjuk kepada manusia itu atas keperluan makan menurut watak dan memberi padanya kodrat kesanggupan untuk memperoleh makanan itu.

Tetapi, kodrat manusia tidak cukup hanya untuk memperoleh makanan. Sekalipun jumlah makanan itu ditekan sesedikit-sedikitnya, sekedar cukup untuk makan sehari-hari saja, misalnya sedikit gandum, namun diperlukan usaha yang banyak juga. Misalnya, menggiling, meramas, dan memasak. Masing-masing pekerjaan membutuhkan sejumlah alat, dan hal ini pun menuntut pekerjaan tangan lebih banyak lagi dari yang telah disebutkan di atas.

Adalah di luar kemampuan manusia untuk melakukan semua itu, ataupun sebagiannya, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa ia tidak dapat berbuat banyak ia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung beberapa tenaga lain dari sesama manusia, jika ia hendak memperoleh makanan bagi dirinya dan sesamanya. Dengan bergotong royong, maka kebutuhan manusia, kendati beberapa kali lebih banyak dari jumlah mereka, dapat dipenuhi.²²”

Manusia adalah hamba Allah swt. yang diciptakan sebagai *khalifatullah fi al-ard* (pelaksana amanah Allah di muka bumi).²³ Manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin mampu menghidupi dirinya tanpa ada bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Suasana berdampingan itulah yang selalu melahirkan perubahan, disebabkan setiap orang memiliki ide dan pemikiran yang mampu mempengaruhi orang lain.

2. Teori Pembangunan (‘*umran*)

Penyediaan fasilitas bagi kebutuhan hidup manusia merupakan konsensus sosial, artinya orang-orang yang hidup di suatu tempat melakukan kesepakatan untuk membangun sarana tempat tinggal yang layak, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana sosial, sarana pedestrian, sarana pengairan dan fasilitas

²² *Ibid*, h. 71 - 72.

²³ Al-Qur’an al-Karim Surah Al-Baqarah ayat 30.

lainnya yang menjamin kelangsungan hidup para penghuni. Semakin banyak penghuni sebuah kawasan, maka semakin kompleks fasilitas yang dibutuhkan.

Ibnu Khaldun mengemukakan, bahwa setelah kedaulatan dicapai, orang dituntut untuk menguasai kota-kota karena dua alasan. Pertama, kedaulatan menyebabkan rakyat berusaha hidup tenteram, tenang, dan santai, serta berusaha melengkapi aspek-aspek peradaban, *'umran*, yang langka di padang pasir. Kedua, para saingan dan musuh dapat menyerang kerajaan, dan setiap orang harus mempertahankan diri dari serangan itu.²⁴

Pandangan Ibnu Khaldun tersebut, memiliki hubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan ibukota negara dari Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Negara yang memiliki kedaulatan wilayah dan kedaulatan hukum, tentu sistem pengelolaan negara harus berada pada sebuah pusat pemerintahan yang tenteram, tenang, dan santai. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas di ibukota negara dirancang untuk memiliki koneksi antar lembaga untuk memudahkan hubungan kepentingan kelembangaan. Tentu kepentingan yang dimaksud yaitu terselenggaranya negara yang adil dan makmur.

'Umran dalam bahasa Arab dari kata *'amara – ya'muru – 'umran – 'amaratan* artinya dihuni – sedang menghuni – tempat hunian. *'Umran* disebut juga dalam arti bangunan. *'Amara* juga asal kata umur atau usia.²⁵ Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kemanfaatan usia seseorang dapat dilihat dari fasilitas atau gedung yang telah dibangun.

Menurut Muhsin Mahdi. *'umran* dalam bahasa Arab, akarnya adalah *'-m-r* yang memiliki arti pokok ; (a) tinggal,

²⁴Ibn Khaldun, *Muqaddimah ...*, h. 397.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 970.

menempati, diam meneruskan, menetap pada suatu tempat, (b) yang didiami, tersedia, atau diolah dan ditanami, dalam keadaan baik, dan (c) Menanam, membangun, melembagakan, memajukan, mengamati, mengunjungi atau mengarahkan.²⁶

‘*Umran* dapat berarti yang didiami, kegiatan, hidup yang sibuk, kemakmuran yang berkembang dan penuh kemajuan; penduduk yang banyak dan kemakmuran sebuah negeri, kultur, peradaban; bangunan, gedung, dan struktur.²⁷ Lalu Muhsin Mahdi memberi makna singkat kepada ‘*Ilm al-‘Umran* sebagai “ilmu kultur”.²⁸

Sosiolog Fuad Baali memberi makna kepada ‘*Ilm ‘Umran* sebagai “ilmu organisasi sosial” yang dalam istilah modern tidak lain adalah sosiologi. Baali kemudian mengutip pendapat P.A. Sorokin tentang *al-Muqaddimah* sebagai “*the earliest systematic treatise both in sociology and in rural-urban sociology*”²⁹

Dalam kitab *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun merinci cakupan ‘*Ilm al-‘Umran* dalam enam bagian pokok, yaitu :

- a. Tentang peradaban manusia pada umumnya, jenisnya bermacam-macam, porsi bumi yang beradab.
- b. Tentang peradaban padang pasir, termasuk laporan tentang suku-suku dan bangsa-bangsa primitif dan liar.
- c. Tentang dinasti-dinasti kekhilafahan, dan kekuasaan bangsawan, termasuk pembicaraan mengenai hierarki pemerintahan.
- d. Tentang peradaban penduduk, menetap, negeri-negeri dan kota-kota.

²⁶Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History*, (Chicago : The University of Chicago Press, 1971), h. 184.

²⁷J.M. Cowan (ed.), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Ithaca New York : Spoken Language Service, 1976), h. 643.

²⁸Muhsin Mahdi, *Ibn ...* h. 284.

²⁹ Fuad Baali, *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*, (New York : State University of New York Press, 1988), h. 13.

- e. Tentang keahlian, cara-cara melangsungkan kehidupan, posisi-posisi yang menguntungkan dan berbagai aspeknya.
- f. Tentang berbagai ilmu pengetahuan, cara pencapaiannya, dan kajian tentang ilmu-ilmu.³⁰

Ibnu Khaldun menampilkan kajian tata ruang dan wilayah pada sebuah kawasan urban atau perkotaan, dengan multidisiplin, yaitu unsur kekuasaan, sains, teknologi, sosiologi, topografi, kebudayaan, karakter penduduk, dan tingkat ekonomi. Pemenuhan unsur-unsur tersebut, penataan kota menjadi dinamis, ramah, dan elegan. Orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman, nyaman, dan optimis.

Nabi Muhammad saw., sebagai seorang Nabi yang diutus oleh Allah, juga sebagai Kepala Negara Madinah al-Munawwarah. Beberapa hadis yang disampaikan kepada penduduk Madinah, yang memiliki makna tata ruang wilayah yang layak ditinggali. Bukan hanya penataan fisik tapi juga harus diikuti oleh penataan hati jernih dan pola sikap jujur.

Nabi Muhammad saw., bersabda :

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَيِّبُ³¹

Terjemahnya:

“Ada empat (tanda) kebahagiaan :Wanita shalihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang shalih, dan kendaraan yang nyaman”.

Fasilitas-fasilitas yang telah dibangun di suatu kawasan, hendaknya mendapatkan perhatian pemeliharaan dari warga masyarakat. Keamanan suatu kawasan jika tercipta saling menghargai satu sama lain. Demikian pula kenyamanan pemakaian

³⁰ *Ibid.*, h. 15.

³¹ Al-Hadiz Nur al-Din ‘Ali bin Abi Bakr al-Haqtami, *Mawarid al-Dham’an Ilaa Zawaid Ibn Hibban*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 302.

fasilitas umum di perkotaan, jika setiap penduduk mampu menjaganya dengan tulus dan sukarela.

Dengan demikian, terminologi ‘*umran* sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw., yaitu :

وَحَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ³²

Terjemahnya:

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”.

Puncak peradaban suatu bangsa, karena pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan memberikan petunjuk dalam memahami potensi yang terdapat di alam raya. Petunjuk arah perjalanan dengan melihat bintang-bintang, sehingga dapat sampai tujuan. Petunjuk mengelola buah kurma menjadi minuman segar dan biji-biji kurma diolah menjadi roti. Petunjuk mengumpulkan biji-biji besi menjadi pisau, parang, tombak, pacul, kapak, dan besi batangan yang bermanfaat untuk penyediaan kebutuhan sehari-hari dan menjadi senjata-senjata tajam untuk mempertahankan anggota kelompok dari serangan kelompok-kelompok lain. Teknologi pertukangan melahirkan bangunan-bangunan yang ditempati oleh anggota keluarga. Teknologi membangun irigasi, sehingga mampu mengelola pengairan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, dan peternakan.

3. Teori Kebangsaan (‘*ashabiyah*)

Naluri manusia secara alami, selalu mencari orang yang memiliki kesamaan pada dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Ada tujuan insidental dan ada tujuan permanen. Tujuan insidental adalah kepentingan sesaat atau jangka pendek, yang hendak dicapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Misalnya, pada sebuah

³²Imam Al-Qudha’iy, *Musnad Asy-Syihab*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), Nomor Hadis 129. Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir Al-Naisabury, *Al Ausath fi Sunan wal Ijma’ wa al-Ikhtilaf*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), Nomor Hadis, 5787.

perjalanan menuju suatu tempat. Seseorang selalu bertanya kepada orang lain yang juga melakukan perjalanan. Pertanyaannya adalah siapa yang hendak menuju suatu tempat. Kalau jawaban dari orang lain itu memiliki maksud yang sama dengan penanya, yakni sama-sama tujuan, maka akan berlanjut keakraban, karena memiliki persamaan kecemasan untuk mencapai tujuan itu. Semakin banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, maka akan semakin mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan perasaan kegembiraan, karena tercipta suatu kekuatan.

Sedangkan tujuan permanen atau tujuan jangka panjang adalah penyelenggaraan kehidupan pada suatu kawasan yang dihuni oleh umat manusia. Seseorang akan selalu bertanya kepada orang lain, tentang tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupannya. Pertanyaan akan diajukan kepada banyak orang untuk menjangkau orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan. Semakin banyak orang yang memiliki kesamaan tujuan, maka semakin kuat merubah kecemasan menjadi kegembiraan dalam menapaki kehidupan di suatu kawasan.

Pada tataran demikian, manusia adalah makhluk zoon politicon. Zoon politicon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles (384 – 322 SM) untuk menyebut makhluk sosial. Zoon politicon merupakan padanan kata dari kata zoon yang berarti "hewan" dan kata politicon yang berarti "bermasyarakat". Secara harfiah, zoon politicon berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Manusia berbeda dengan hewan karena mereka memiliki akal (logos) yang memungkinkan manusia untuk berbicara, mengkritik, dengan sengaja, mengatakan benar dari yang salah.

Aristoteles menyebut manusia sebagai binatang politik (zoon politikon) juga dikaitkan manusia sebagai binatang rasional (zoon logikon). Manusia memiliki kecenderungan untuk bergabung

dengan manusia lain untuk membentuk sebuah komunitas. Manusia tidak dapat bertahan tanpa hidup bermasyarakat atau bersosialisasi. Manusia tidak bisa hidup dan berinteraksi dengan baik tanpa hidup bermasyarakat.

Pada konsepsi manusia pada arena sosial yang lebih luas, politikon menjadi asumsi politik. Aristoteles berpendapat bahwa politik berkaitan dengan pengelolaan kepentingan dan urusan masyarakat secara keseluruhan, setiap masyarakat yang terorganisir adalah tanggung jawab utama tatanan politik. Masyarakat negara secara alami membutuhkan kondisi dan suasana bermasyarakat dengan aman dan nyaman.

Perasaan kesamaan pada suatu kepentingan itulah yang disebut solidaritas kelompok yang oleh Ibnu Khaldun disebut *'ashabiyah*. Pada perkembangannya, *'ashabiyah* bermakna ideologi negara. Pada awalnya, sebuah kekuasaan dibangun atas perjuangan melepas nasib penderitaan, namun seiring berjalannya waktu, godaan materi menjadi penyebab hilangnya solidaritas, yang tertinggal adalah konsensus kekuasaan untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Demikian sekelumit pandangan Ibnu Khaldun tentang Ashabiyah, yang menjadi acuan dalam menyorot timbul dan tenggelamnya sebuah kekuasaan. Kini, bukan kekuasaan negara atau kekuasaan politik, tapi juga berkembang ke arah kajian kekuasaan ekonomi atau kekuasaan bisnis. Kekuasaan ekonomi dan bisnis yang kerap dilihat oleh masyarakat yang mampu mengendalikan kekuasaan negara dan politik. Munculnya, isu dan kasus *money politic*, menandai kebenaran argument tersebut.

Ibnu Khaldun mengemukakan, kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas rakyat. Sebagaimana telah kita ketahui, kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat, dan yang anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama. Kedudukan

sebagai raja adalah kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala kekayaan duniawi, dan juga kepuasan lahir dan batin. Karena itu, ia menjadi sasaran perebutan, dan jarang sekali dilepaskan dengan sukarela, sebaliknya, selalu di bawah kekuasaan. Perebutan membawa kepada perjuangan dan peperangan, dan runtuhnya singgasana-singgasana. Kesemuanya itu tidak bisa terjadi kalau tidak dengan solidaritas sosial.³³

Kekuatan soliditas dan solidaritas dalam Islam mengambil tempat yang sangat tepat, ketika jihad dikumandangkan dengan tujuan untuk menegakkan syariat Islam. Ghirah dan gairah umat Islam begitu kuat, jika semangat dakwah menjadi ruh perjuangan membangun kekuasaan politik. Karena dengan kekuasaan, dakwah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Agama Islam sudah diterima oleh masyarakat jazirah Arab, pada masa hidup Nabi Muhammad saw., karena semangat dakwah yang menyatukan umat Islam untuk menyiarkan ajaran Islam. Pusat komando dakwah berada di kota Madinah, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw., memiliki legitimasi kekuasaan politik, sehingga dakwah dapat disiarkan dan disiarkan melalui hubungan-hubungan diplomatik dengan beberapa kerajaan, seperti Romawi, Persia, Yaman, Mesir, Tunisia, Yerussalem dan Syam.

Ibnu Khaldun menguraikan teori *'ashabiyah* dengan panjang lebar, termasuk macam, kadar dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara, sebagai berikut :

- a. Solidaritas kelompok terdapat dalam watak manusia. Dasarnya dapat bermacam-macam: ikatan darah atau persamaan keturunan, bertempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan atau aliansi, dan hubungan antara pelindung dan yang dilindungi. Pembangkit *'ashabiyah* adalah rasa malu pada

³³Ibnu Khaldun, *Muqaddimah ...* Terjemahan ..., h. 187.

setiap manusia kalau terjadi perlakuan tidak adil atau penganiayaan atas mereka yang mempunyai hubungan berdasarkan satu atau lebih dari ikatan-ikatan tersebut.

- b. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu dinasti atau negara besar. Oleh karenanya jarang terjadi suatu dinasti dapat berdiri di suatu kawasan di mana terdapat beraneka ragam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu sama lain, dan tiap kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut didukung oleh *ashabiyah* suku, atau dengan perkataan lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat homogenitas, sehingga menimbulkan solidaritas kelompok yang kuat.
- c. Seorang kepala negara atau raja, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun terhadap ancaman dari luar, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai. Untuk itu dia memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap otoritas dan kekuasaannya. Oleh karenanya, dari berbagai *ashabiyah* atau solidaritas kelompok terdapat di negara itu, kepala negara atau raja harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan.
- d. Banyak dinasti atau negara besar yang bangun dari atau agama, oleh karena kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau raja itu berkat adanya superioritas atau keunggulan. Keunggulan tercapai karena adanya solidaritas kelompok yang kuat, dan hanya dengan pertolongan Tuhan dalam menegakkan agama maka manusia sepakat untuk tidak mendesak kemauan atau

ambisinya masing-masing, dan sebaliknya bersatu hati untuk mengusahakan tujuan-tujuan yang lebih mulia.³⁴

Kemajuan peradaban manusia, dengan pendirian beberapa negara sudah bergerak dari solidaritas kelompok menjadi soliditas konsensus. Piagam Madinah yang dimotori oleh Nabi Muhammad saw. pada tahun 622 Masehi, adalah konsensus bersama orang-orang Madinah yang terdiri atas suku Quraisy, Auz, dan Khazraj. Para penganut agama Islam, Yahudi, dan Nasrani, mendapatkan pengayoman keamanan di bawah naungan Piagam Madinah.

Perkembangan konsensus menjadi konstitusi merupakan penalaran kehidupan bernegara dengan sistem kebangsaan. Republik Indonesia dengan landasan konstitusi Undang Undang Dasar 1945 pada awalnya juga berasal dari Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan landasan ideologi bernegara yaitu Pancasila. Teori kebangsaan yang bermula dari jaringan nusantara masa lalu, berkembang seiring dengan perubahan alam, budaya, dan sosial, sehingga muncul tekad empat pilar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang Undang Dasar 1945.

Teori *'ashabiyah* yang dikemukakan Ibnu Khaldun menjadi ikatan kebangsaan, di dalamnya terdapat kepentingan persamaan nasib yang diayomi oleh sistem kenegaraan. Pemimpin yang tampil menjadi kepala negara, lahir dari konsensus warga negara melalui pemilihan umum. Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, memiliki kedaulatan individu untuk menentukan pilihan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh otoritas penyelenggara pemilihan umum.

PENUTUP

Berdasarkan rumusan artikel tentang peradaban infrastruktur Ibnu Khaldun dalam sorotan perspektif perpindahan Ibu Kota

³⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan ...*

Negara Republik Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Pusat pemerintahan negara Indonesia merupakan manifestasi dan manifes sejarah nusantara, yang memiliki kedaulatan sistem kerajaan yang berkembang sesuai dengan perubahan lokal dan global.
- b. Penentuan titik ibu kota negara dimaknai sebagai pusat penyebaran informasi dan distribusi kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Ibu kota negara menjadi tanda kedaulatan dan kehormatan negara dari pandangan bangsa-bangsa lain.
- c. Pandangan Ibnu Khaldun terhadap kepatuhan rakyat kepada pemimpinnya, merupakan tonggak kekuatan dan inovasi infrastruktur sebuah negara. Bangunan fisik dan ornamen artistik sebuah infrastruktur, mencerminkan karakter penghuni dan penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ali., A. Mukti, *Ibnu Chaldun dan Asal Usul Sosiologi*, (Yogyakarta : Yayasan Nida, 1997).

ibn Khaldun. Abd al-Rahman bin Muhammad, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut : al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2008).

-----Abd al-Rahman bin Muhammad, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terjemahan Ahmadie Thoha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986).

Munawwir,Ahmad Warson., *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997).

al-Haetsami, Al-Hadiz Nur al-Din 'Ali bin Abi Bakr., *Mawarid al-Dham'an Ilaa Zawaid Ibn Hibban*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).

- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1985).
- Al-Naisabury, Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir, *Al Ausath fi Sunan wal Ijma' wa al-Ikhtilaf*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000).
- Biyanto, *Teori Siklus Peradaban : Perpektif Ibnu Khaldun*, (Surabaya : LPAM, 2004).
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa : Silang Budaya*, Jilid 2, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Jabali, Fuad., *Society, State, and Urbanisme: Ibn Khaldun's Sociological Thought*, (New York : State Univesity of New York Press, 1988).
- Imam Al-Qudha'iy, *Musnad Asy-Syihab*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000).
- J.M. Cowan (ed.), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Ithaca New York : Spoken Language Service, 1976).
- Mahdi, Muhsin., *Ibn Khaldun's Philosophy of History*, (Chicago : The University of Chicago Press, 1971).
- Sjadzali, Munawir., *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 1993).
- Tim Ekspedisi Palu Koro, "Geologi di Tengah Gencarnya Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Jokowi", dalam <http://ekspedisipalukoro.id/2017/05/10/geologi-di-tengah/>